

Collaborative Governance dalam Mendukung Pengembangan Ekowisata AMKE Kota Batu

Collaborative Governance in Supporting the Development of AMKE Ecotourism in Kota Batu

Lintar Brilliant Pintakami*¹, Pravasta Wahyu Satriawan¹, Yayuk Yulianti¹

¹Universitas Brawijaya; Jl. Veteran, Kota Malang, telp : (0341) 551611

¹Program Studi Sosiologi Pertanian, Universitas Brawijaya

e-mail: *¹lintar.fp@ub.ac.id.

ABSTRAK

Pentingnya kolaborasi antar *stakeholder* dalam mendukung pengembangan wisata pedesaan menjadi hal penting yang tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan kolaborasi tersebut harus berjalan dalam visi yang sama. Berbekal konsep *Collaborative Governance*, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kolaborasi pengembangan Ekowisata AMKE dari sudut pandang petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan pada wisata AMKE di Desa Oro-Oro Ombo. Sampel dari penelitian ini ditetapkan secara sensus yaitu 32 orang petani KTH Panderman dengan pertimbangan petani tersebut merupakan aktor utama dalam pengembangan AMKE. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dengan bantuan kuesioner. Analisa data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan AMKE telah dimulai dengan tatap muka untuk mencapai kepercayaan, komitmen, dan rasa saling memahami antar *stakeholder* terkait. Namun, pada luaran sementara, belum ada hasil sementara dari atas kesepakatan yang telah dibangun. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu keseriusan dari para *stakeholder* mengingat modal sosial dalam pengembangan AMKE terbilang baik.

Kata kunci—AMKE, Ekowisata, Kolaborasi, Petani, Stakeholder

ABSTRACT

The importance of collaboration between stakeholders in supporting rural tourism development is an important thing that cannot be ignored. The implementation of this collaboration must run in the same vision. Armed with the concept of Collaborative Governance, this research aims to describe the collaborative process of developing AMKE Ecotourism from the farmer's perspective. This research uses a quantitative approach carried out on AMKE tourism in Oro-Oro Ombo Village. The sample for this research was determined by census, namely 32 KTH Panderman farmers with the consideration that these farmers were the main actors in the development of AMKE. The data collection technique was carried out by interview with the help of a questionnaire. Data analysis in this study used descriptive statistics. The research results show that AMKE development has started with face-to-face meetings to achieve trust, commitment and mutual understanding between relevant stakeholders. However, in terms of temporary outcomes, there are no temporary results from the agreements that have been

made. The recommendation from this research is that stakeholders need to be serious considering that social capital in AMKE development is fairly good..

Keywords—AMKE, ecotourism, collaboration, farmer, stakeholder

PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan menjadi isu strategis yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kondisi tersebut tercipta terutama karena dampak kehadiran Desa Wisata yang dinilai mampu memberikan peningkatan taraf hidup terhadap masyarakat sekitar (Wahyuningsih & Pradana, 2021). Masyarakat sebagai tokoh utama dalam pengembangan Desa Wisata menyadari bahwa apabila potensi di wilayahnya dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya (Saputra, 2019; Tukiman & Trisna, 2019). Kedua premis tersebut secara singkat menjelaskan bahwa pengembangan sebuah Desa menjadi kawasan wisata dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan desa dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Aktivitas pengembangan wisata pedesaan merupakan sarana bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di tingkat desa. Melalui kegiatan wisata, dapat tercipta beragam lapangan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kehadiran masyarakat tentunya menjadi aspek vital dalam pengembangan Desa Wisata. Selain sebagai sarana untuk mendapatkan peningkatan perekonomian, masyarakat dapat berperan penting dalam menciptakan iklim kegiatan wisata secara berkelanjutan melestarikan budaya dan kearifan lokal yang telah ada sebelumnya (Prihastha & Suswanta, 2020). Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran

pemerintah setempat yang terbuka, saling percaya, dan berkomitmen tinggi. Peran aktif pemerintah desa setempat dalam mengelola potensi desa menjadi ujung tombak berkembangnya desa tersebut.

Premis-premis tersebut menjelaskan bahwa pengembangan wisata membutuhkan kerjasama atau kolaborasi antar pihak dalam hal ini masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak swasta. Kolaborasi menjadi kekuatan baru di era Revolusi Industri 4.0 dalam membantu menunjang kegiatan tata kelola pemerintahan (Molla et al., 2021). Kehadiran kolaborasi dimaksudkan untuk mewadahi keterbatasan pemerintah setempat dalam mendukung pembangunan daerah. (Ariesmansyah et al., 2023). Kehadiran aktor-aktor kompeten dibidangnya dapat secara konstruktif melengkapi kekurangan dan kebijakan pada tataran penerapan program kebijakan (Ariesmansyah, 2022). Dalam konteks pengembangan wisata, kerjasama antar pihak-pihak terkait dapat menjadi kunci mendukung kemajuan wisata.

Faktanya, tidak semua kegiatan pengembangan wisata telah menerapkan konsep *collaborative governance* dalam menjalankan pengelolaannya. Kondisi tersebut dapat ditemukan pada Ekowisata Area Model Konservasi dan Edukasi (AMKE) di Desa Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu. Pengembangan AMKE telah berlangsung \pm 5 tahun sejak 2019. Namun, sampai saat ini pengembangan AMKE masih belum berjalan dengan baik karena minimnya peran pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan wisata tersebut. Padahal, partisipasi

masyarakat dalam hal ini anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Panderman sebagai pengelola cukup tinggi dalam mendukung pengembangan AMKE. Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dalam menggandeng pihak-pihak terkait seperti BUMDes, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dsb. Meskipun permasalahan pengembangan AMKE terbilang kompleks, namun pada intinya, peran pemerintah Desa sebagai ujung tombak pembangunan desa menjadi kunci menjawab permasalahan tersebut.

Hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran *collaborative governance* dapat menjadi jawaban dalam mengatasi permasalahan pengembangan AMKE. Ansell & Gash (2008) menjeleaskan bahwa pelibatan *non-state* aktor seperti pihak masyarakat dan swasta dinilai dapat memaksimalkan implementasi kebijakan dalam hal ini pengembangan AMKE. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses kolaborasi pengembangan Ekowisata AMKE dari sudut pandang Petani KTH Panderman sebagai masyarakat pengelola AMKE. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan pemerintah Desa mengenai kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam memaksimalkan pengembangan AMKE yang terbilang berpotensi namun saat ini tidak berjalan dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan Juni 2024. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Oro-Oro Ombo, Kec. Batu, Kota Batu. Penetapan Lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan Lokasi tersebut merupakan tempat pengembangan Ekowisata AMKE.

Pendekatan Penelitian dan Teknik Penetapan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif yang berdesain survei. Penggunaan pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat berlangsung secara sistematis.

Populasi pada penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Panderman berjumlah 32 orang sebagai masyarakat yang mengelola AMKE dari awal sampai saat ini.. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik sampel sensus yaitu memasukkan semua populasi menjadi sampel.

Jenis, Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Penelitian

Data pada penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara menggunakan kuesioner tertutup. Sedangkan data sekunder didapatkan dari *review* artikel/jurnal, profil desa, dsb untuk menguatkan hasil analisa pada data primer.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menjabarkan fenomena yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sebuah wisata membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan lebih efektif. Kehadiran masing-masing pihak seperti masyarakat dan *stakeholder*. Kolaborasi antar pihak tersebut tentunya dapat membantu pemerintah desa dalam mengoptimalkan tercapainya tujuan dari pengembangan desa wisata tersebut. Kehadiran tata pamong dalam pengembangan AMKE terbilang perlu dilakukan secara kolaboratif dengan masyarakat, *stakeholder* seperti dinas wisata, pertanian, akademisi, dan pihak

swasta, yang berkompten dalam bidang yang dibutuhkan.

1. *Face to face dialog* dalam Pengembangan AMKE

Dialog tatap muka antar pihak baik masyarakat, pemerintah desa, dan *stakeholder* terkait dalam pengembangan AMKE. Pelaksanaan dialog tatap muka terkait pembahasan AMKE pernah dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan yaitu Petani KTH Panderman, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, Lembaga internal desa seperti Karang Taruna, BUMDes, Pokdarwis, dan PKK, serta dari akademisi yaitu Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan dialog tatap muka dimulai dengan observasi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dan dilanjutkan dengan pelaksanaan FGD antar pihak terkait. Kesimpulan dari pelaksanaan FGD tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya intensi khusus dari pemerintah desa serta Lembaga internal lainnya dalam memperbaiki AMKE yang saat ini tidak berjalan.

Proses kolaborasi antar pihak dimulai dengan dialog tatap muka dengan tujuan menghasilkan suatu kesepakatan dalam hal ini memperbaiki ekowisata AMKE (Yasintha, 2020). Keadaan tersebut perlu disadari oleh pihak sekitar bahwa pengembangan AMKE memerlukan dukungan berupa manajemen maupun pengelolaan dari berbagai pihak yang bersifat sederhana, dinamis, dan solid (Yacob et al., 2021). Kondisi tersebut perlu diperhatikan agar pembangunan ekowisata AMKE yang selama ini telah direncanakan dapat berjalan kembali sesuai pada *tracknya*.

Tabel 1. Dialog tatap muka

Sub-Variabel	Kategori	N	%
	Rendah (9 – 12,4)	8	25

<i>Face to face dialog</i>	Sedang (12,5 – 15,9)	16	50
	Tinggi (16 – 19,4)	8	25
Total		32	100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Pelaksanaan dialog tatap muka juga mendapatkan penilaian dari KTH Panderman. Tabel diatas menjelaskan bahwa 50% petani KTH Panderman menilai pelaksanaan dialog tatap muka pada kategori sedang. Petani menjelaskan bahwa dari kegiatan rapat tersebut, belum ada tindak lanjut nyata sampai saat ini. Padahal, kondisi AMKE semakin hari makin meprihatinkan. Hadirnya dialog tatap muka antar pihak berkaitan seharusnya dapat menjadi wadah untuk menyampaikan saran mengenai program yang harus dilaksanakan. Lebih dari itu, Asurah & Wibawani (2023) menjelaskan bahwa kehadiran dialog tatap muka seharusnya dapat menjadi wadah untuk saling mempercayai antar pihak terkait guna memaksimalkan pembangunan dalam hal ini AMKE.

Perlu ada tindakan khusus mengingat kehadiran Ekowisata AMKE berpeluang besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian antar pihak yang terlibat menjadi catatan penting agar pengembangan AMKE dapat berjalan dengan maksimal.

2. *Trust Building* dalam Pengembangan AMKE

Membangun kepercayaan merupakan aspek penting dalam menjalankan kerjasama antar pihak yang berkepentingan. Rasa saling percaya dapat menumbuhkan solidaritas tinggi sehingga berimplikasi terhadap satunya visi yang diterjemahkan dalam pelaksanaan secara bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing. Pengembangan Ekowisata AMKE telah menerapkan rasa saling percaya antar pihak dalam melaksanakannya. Awalnya,

pengembangan AMKE telah dilaksanakan secara bergotong royong beberapa pihak baik internal maupun eksternal Desa Oro-Oro Ombo. Selain itu, tingginya partisipasi petani KTH Panderman dalam pengembangan AMKE merupakan modal sosial tinggi dalam mensukseskan ekowisata tersebut.

Dinamika pengembangan Ekowisata AMKE berjalan sampai akhirnya kepercayaan tersebut runtuh terutama karena perbedaan pandangan dengan pihak penyuluh kehutanan sebagai pemandu jalannya pengembangan AMKE. Kurang dinamisnya sikap penyuluh dalam menuntun pengembangan AMKE menurunkan secara perlahan partisipasi petani KTH Panderman. Kondisi tersebut tidak memungkinkan pelaksanaan kolaborasi menjadi lebih baik. Membangun kepercayaan memerlukan komitmen tingkat tinggi antar waktu (Ismail et al., 2020). Kepercayaan tinggi berdampak langsung terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan pengembangan AMKE. Sebaliknya, kepercayaan rendah berdampak pada kurang maksimalnya partisipasi Petani KTH Panderman sehingga enggan menjalankan Ekowisata tersebut dengan sungguh-sungguh.

Tabel 2. Membangun kepercayaan

Sub-Variabel	Kategori	N	%
<i>Trust building</i>	Rendah (9 – 12,7)	11	34
	Sedang (12,8 – 16,5)	9	28
	Tinggi (16,6 – 20,3)	12	38
	Total	32	100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Kehadiran Pemerintah Desa menjadi hal penting untuk memperbaiki keadaan tersebut ditengah terdegradasinya rasa kepercayaan Petani KTH Panderman pada penyuluh pendamping. Hasil dialog tatap muka dengan berbagai pihak internal Desa Oro-Oro Ombo dan Universitas

Brawijaya mendapatkan Kesimpulan bahwa Petani KTH Panderman mempercayakan pengembangan AMKE pada Pemerintah Desa dan Lembaga internalnya. Kondisi tersebut sesuai dengan tabel diatas bahwa 38% petani panderman percaya pada Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dapat melanjutkan pengembangan AMKE. Adapun 34% petani KTH Panderman masih mengalami trauma sehingga tingkat kepercayaan nya berada pada kategori rendah.

Kepercayaan tersebut dititipkan oleh KTH Panderman pada Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo saat pelaksanaan diskusi bersama. Keberhasilan kolaborasi memerlukan rasa saling percaya antar pihak yang terlibat (Arianti & Satlita, 2018). Petani KTH Panderman percaya bahwa dengan menitipkan kepercayaan pada Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan Lembaga internal seperti BUMDes, Karang Taruna, dan Pokdarwis, dapat menjadi sarana menghidupkan kembali Ekowisata AMKE. Petani KTH Panderman percaya bahwa masing-masing Lembaga memiliki SDM yang kompeten dan berkualitas untuk mendukung pengembangan AMKE. Hal tersebut sejalan dengan Wiyanti (2021) bahwa pengembangan Desa Wisata membutuhkan kehadiran pihak-pihak yang kompeten, mengerti dan memahami prinsip ekowisata, serta berkualitas dalam pelaksanaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa rasa kepercayaan dapat menghidupkan harapan dari Petani KTH Panderman untuk mencapai kesejahteraannya.

3. *Commitment to Process* dalam Pengembangan AMKE

Komitmen terhadap proses termasuk poin penting dalam pelaksanaan kolaborasi antar pihak *stakeholder* terkait. Asurah & Wibawani

(2023) menjelaskan bahwa komitmen dipandang dari dua hal yaitu sikap dan perilaku. Komitmen sikap diwujudkan dengan memperhatikan pikiran seseorang yang terkait dengan organisasi tersebut serta mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan nilai dan tujuan selama dalam organisasi. Sedangkan komitmen pada perilaku diwujudkan dalam bagaimana penyelesaian masalah dalam organisasi. Komitmen terhadap proses dapat dilihat dari bagaimana suatu organisasi dapat menerapkan nilai-nilai maupun tujuan pelaksanaan kolaborasi.

Para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata AMKE telah saling berkomitmen untuk berproses menjelankan wisata tersebut terlepas dengan kondisinya saat ini. Hasil diskusi bersama menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dan Lembaga internal telah berkomitmen mendukung pengembangan Ekowisata AMKE setelah penyuluh pendamping mengundurkan diri dari wisata tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kepercayaan bahwa masing-masing pihak saling bergantung pada pihak lainnya dalam menjalankan Ekowisata AMKE (Utami et al., 2021). Akan tetapi, setelah adanya diskusi bersama dengan beberapa pihak terkait, sampai saat ini (Juli 2024), belum terdapat tindakan nyata yang dilaksanakan sesuai dengan konsesus yang telah disepakati bersama dengan antar Lembaga Desa tersebut dan Petani KTH Panderman.

Tabel 3. Komitmen dalam proses

Sub-Variabel	Kategori	N	%
Commitment to process	Rendah (9 – 12,7)	9	28
	Sedang (12,8 – 16,5)	14	44

Tinggi (16,6 – 20,3)	9	28
Total	32	100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Tabel diatas menjelaskan bahwa 44% Petani KTH Panderman menilai komitmen bersama yang telah dilakukan berada pada kategori sedang. Petani KTH Panderman merasa belum ada kegiatan nyata yang dilakukan atas diskusi yang telah dilaksanakan. Ansell & Gash (2008) menjelaskan bahwa antar pihak terkait perlu memiliki rasa tanggung jawab terhadap langkah-langkah yang telah disepakati bersama. Kehadiran akademisi dalam hal ini Universitas Brawijaya telah berupaya memicu terciptanya iklim partisipatif dengan menghadirkan beberapa pelatihan yang menysasar pada peningkatan kapasitas SDM. Namun, kunci utama dalam pengembangan Ekowisata AMKE tetap ditekankan pada aktor-aktor internal Desa Oro-Oro Ombo.

Perlu adanya kesadaran tinggi dari masing-masing Lembaga internal Desa Oro-Oro Ombo dalam hal menghidupkan kembali pengembangan AMKE. Meskipun tidak dilaksanakan dengan cepat, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut terkait kondisi Ekowisata AMKE yang saat ini semakin tidak terawat. Hal tersebut dapat berdampak langsung pada hilangnya harapan Petani KTH Panderman yang diterjemahkan dalam enggannya petani berpartisipasi saat wisata tersebut mulai diperbaiki baik dari segi infrastruktur, konsep, maupun, SDM.

4. *Shared Understanding* dalam Pengembangan AMKE

Pemahaman bersama antar *stakeholder* dalam pengembangan Ekowisata AMKE menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam proses kolaborasi. Rasa saling memahami

merupakan terjemahan nyata dari visi, misi, maupun tujuan hadirnya Ekowisata AMKE. Pada tahap ini, masing-masing *stakeholder* harusnya memiliki pemahaman bersama terhadap beragam permasalahan yang ditemukan serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Ansell & Gash, 2008). Kurangnya rasa saling paham antar pihak dapat berkontribusi langsung terhadap terciptanya permasalahan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pengembangan Ekowisata AMKE setelah permasalahan sebelumnya dengan penyuluh pendamping telah tiba pada titik perlu adanya intervensi terutama dari Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo mengingat kondisinya saat ini yang terbelengkalai. Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan Lembaga internalnya tentunya harus menyadari bahwa pengembangan Ekowisata AMKE tidak dapat hanya dilakukan oleh Petani KTH Panderman. Kolaborasi antar pihak-pihak tersebut dengan cara saling memahami menjadi aspek penting yang harus di utamakan untuk mengatasi permasalahan pada wisata tersebut.

Tabel 4. Berbagai pemahaman

Sub-Variabel	Kategori	N	%
Shared understanding	Rendah (9 – 12,4)	8	25
	Sedang (12,5 – 15,9)	15	47
	Tinggi (16 – 19,4)	9	28
Total		32	100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Tabel diatas menjelaskan bahwa pengembangan 47% petani KTH Panderman merasa bahwa pemahaman bersama antar *stakeholder* terkait pengembangan AMKE berada pada kategori sedang. Keadaan tercipta karena Petani merasa Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan Lembaga internal seperti Karang Taruna, Pokdarwis, dan BUMDes mengerti kondisi AMKE saat

ini. Di lain sisi, petani KTH Panderman juga mengerti bahwa tentu terdapat kendala yang membuat pengembangan AMKE tidak dapat diperbaiki secara langsung dengan cepat sehingga petani harus menunggu. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Petani KTH Panderman telah berusaha memahami, mengetahui, dan melihat dari berbagai macam sudut pandang (Aprinawati, 2018).

Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi menjadi bukti bahwa sampai saat ini petani KTH Panderman masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan Lembaga internalnya dengan harapan Ekowisata tersebut dapat kembali beroperasi seperti sebelumnya. Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo perlu memperhatikan juga turunnya partisipasi Petani KTH Panderman karena mengharapkan kepastian terhadap wisata AMKE sebagai sarana peningkatan pendapatannya.

5. *Intermediate Outcomes* dalam Pengembangan AMKE

Hasil sementara merupakan sarana efektif untuk menimbulkan iklim kolaborasi semakin baik antar pihak yang terlibat dalam pengembangan Ekowisata AMKE. Kolaborasi dapat dimungkinkan berlanjut bila terdapat wujud hasil antara yang dapat dirasakan secara nyata meskipun kecil nilainya (Ansell & Gash, 2008). Hal kecil tersebut dapat memberikan pengaruh baik terhadap proses kolaborasi antar pihak yang terlibat yaitu Petani KTH Panderman, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, Lembaga internal desa seperti BUMDes, Karang Taruna, Pokdarwis, dan Lembaga lainnya.

Tabel 5. Luaran sementara

Sub-Variabel	Kategori	N	%
	Rendah (9 – 12,7)	10	31

Intermediate outcomes	Sedang (12,8 – 16,5)	16	50
	Tinggi (16,6 – 20,3)	6	19
	Total	32	100

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa 50% petani KTH Panderman menilai keberhasilan sementara pada kondisi sedang. Kondisi tersebut terjadi karena petani KTH Panderman masih memiliki harapan terhadap pengoptimalan wisata tersebut dengan hadirnya intervensi Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dan Lembaga internalnya. Sedangkan, 31% menilai hasil sementara berada pada kategori rendah karena sampai saat ini (Juli, 2024) belum ada tindakan nyata sejak diadakan diskusi bersama tahun lalu mengenai pengembangan AMKE.

Petani KTH Panderman masih memiliki harapan agar pengembangan AMKE dapat dijalankan kembali karena potensinya akan edukasi hutan yang strategis untuk dijadikan kegiatan wisata. Selain itu, petani KTH Panderman merasa bahwa kehadiran AMKE dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat (Suranny, 2021), melestarikan sumber daya alam dan lingkungan (Sugiarti dalam Satriawan et al (2023) dan mengangkat keunikan budaya di Desa Oro-Oro Ombo (Tompondung dalam (Satriawan et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang terjadi pada pengembangan Ekowisata AMKE telah dimulai dengan 1) diskusi tatap muka dimana mencapai kesepakatan bersama untuk 2) saling membangun kepercayaan dan 3) komitmen antar pihak pengelola yaitu Petani KTH Panderman, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo, dan Lembaga internal desa dalam 4) memahami secara bersama pentingnya

kolaborasi antar pihak. Akan tetapi, belum adanya tindakan nyata yang diwujudkan dalam 5) luaran sementara menjadi catatan penting yang harus diperhatikan agar partisipasi petani tidak mengalami penurunan karena tidak ada kepastian.

SARAN

Dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan perlu adanya keseriusan dari para *stakeholder* dengan masing-masing tupoksinya dalam memaksimalkan pengembangan AMKE mengingat adanya modal sosial yang bagus yaitu partisipasi petani KTH Panderman dalam menjalankan pengembangan Ekowisata AMKE. Saran selanjutnya, diperlukan ada penelitian lebih lanjut untuk menganalisa pengaruh antar variabel untuk membahas pola kolaborasi antar *stakeholder* lebih lanjut dalam mendukung pengembangan AMKE.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aprinawati, I. (2018). Penggunaan Model Peta Pikiran (Mind Mapping) untuk Meningkatkan Pemahaman Membaca Wacana Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 2(1), 140–147.
- Arianti, D., & Satlita, L. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(6), 809–827.
- Ariesmansyah, A. (2022). Collaborative Governance in Enforcement Program for Restrictions on

- Community Activities in Bandung City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 290–300.
- Ariesmansyah, A., Ariffin, R. H. B., & Respati, L. A. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal El-Riyasah*, 14(1), 58–72.
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance Pengembangan Objek Wisata Air Embung “Bandung Bondowoso” Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167–177.
- Ismail, B. R., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Tanjungpinang 2108. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 49–58.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148.
- Prihastha, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(1), 221–240.
- Saputra, E. (2019). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kampung Wisata Kungkuk. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 316–324.
- Satriawan, P. W., Hanim, F., Safitri, R., & Sawitri, B. (2023). Penyuluhan: Mampukah Menghadirkan Perubahan? *AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian*, 22(1), 28–37.
- Satriawan, P. W., Sugiyanto, S., Kustanti, A., & Sawitri, B. (2024). Pengaruh Karakteristik Terhadap Persepsi Petani dalam Pengembangan Agrowisata “Bon Deso”, Kota Batu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 00.
- Suranny, L. E. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati*, 5(1), 49–62.
- Tukiman, T., & Trisna, A. Y. (2019). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Usaha Pembuatan Abon dengan Bahan Dasar dari Jantung Pisang di Desa Dompnyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 38–47.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 281–298.
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334.
- Wiyanti, T. (2021). Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekowisata Taman Buah Jeruk Kabupaten Malang (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 77–81.
- Yacob, S., Qomariyah, N., Marzal, J., & Maulana, A. (2021). Strategi Pemasaran Desa Wisata. *WIDA Publishing*.

Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23.